

LAMPIRAN A.III
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2011
 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING PENDAPATAN

KODE REKENING	URAIAN
4	PENDAPATAN
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah
4 . 1 . 1 . 1	Pajak Kendaraan Bermotor
4 . 1 . 1 . 1 . 1	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)
4 . 1 . 1 . 1 . 2	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)
4 . 1 . 1 . 1 . 3	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)
4 . 1 . 1 . 1 . 4	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)
4 . 1 . 1 . 1 . 5	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)
4 . 1 . 1 . 1 . 6	C-2 Truck, Pick up (Umum)
4 . 1 . 1 . 1 . 7	D-1. Kendaraan khusus (Pribadi)
4 . 1 . 1 . 1 . 8	D-2. Kendaraan khusus (Umum)
4 . 1 . 1 . 1 . 9	E. Sepeda Motor
4 . 1 . 1 . 1 . 10	F Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air
4 . 1 . 1 . 1 . 11	Alat Berat/ Besar
4 . 1 . 1 . 1 . 12	Dst.....
4 . 1 . 1 . 2	Pajak Kendaraan di Air
4 . 1 . 1 . 2 . 1	Pajak Kendaraan di Air ...
4 . 1 . 1 . 2 . 2	Dst.....
4 . 1 . 1 . 3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4 . 1 . 1 . 3 . 1	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Pribadi)
4 . 1 . 1 . 3 . 2	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)
4 . 1 . 1 . 3 . 3	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)
4 . 1 . 1 . 3 . 4	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)
4 . 1 . 1 . 3 . 5	C-1 Truck, Pick Up (Pribadi)
4 . 1 . 1 . 3 . 6	C-2 Truck, Pick up (Umum)
4 . 1 . 1 . 3 . 7	D-1. Kendaraan khusus (Pribadi)
4 . 1 . 1 . 3 . 8	D-2. Kendaraan khusus (Umum)
4 . 1 . 1 . 3 . 9	E. Sepeda Motor
4 . 1 . 1 . 3 . 10	F Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air
4 . 1 . 1 . 3 . 11	Alat Berat/Besar
4 . 1 . 1 . 3 . 12
4 . 1 . 1 . 4	Bea Balik Nama Kendaraan Di Air
4 . 1 . 1 . 4 . 1	Bea Balik Nama Kendaraan Di Air
4 . 1 . 1 . 4 . 2	Dst.....
4 . 1 . 1 . 5	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4 . 1 . 1 . 5 . 1	Premium
4 . 1 . 1 . 5 . 2	Pertamax
4 . 1 . 1 . 5 . 3	Pertamax Plus
4 . 1 . 1 . 5 . 4	Solar
4 . 1 . 1 . 5 . 5	Gas
4 . 1 . 1 . 5 . 6	Dst.....
4 . 1 . 1 . 6	Pajak Air Permukaan
4 . 1 . 1 . 6 . 1	Pajak Air Permukaan
4 . 1 . 1 . 6 . 2	Dst.....
4 . 1 . 1 . 7	Pajak Rokok
4 . 1 . 1 . 7 . 1	Pajak Rokok

KODE REKENING	URAIAN
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah
4.1.2.1	Retribusi Jasa Umum
4.1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.2.1.2	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor
4.1.2.1.3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.1.2.1.4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.2.1.5	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4.1.2.1.6	Retribusi Iteges
4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.2.2.2	Retribusi Tempat Pelelangan
4.1.2.2.3	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
4.1.2.2.4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.1.2.2.5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
4.1.2.2.6	Retribusi Penyebrangan di air
4.1.2.2.7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4.1.2.2.8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.2.2.9	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.2.10	Dst
4.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.2.3.1	Retribusi Izin Trayek
4.1.2.3.2	Retribusi Surat Ijin Usaha Perikanan
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.3.1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4.1.3.1.1	PT. Bank NTB
4.1.3.1.2	PT. DAERAH MAJU BERSAING (DMB)
4.1.3.1.3	PT. Suara Nusa Media Pratama (Lombok Post)
4.1.3.1.4	PD BPR-LKP
4.1.3.1.5	PT. Gerbang NTB E-Mas
4.1.3.1.6	PT. Asuransi Bangun Askrida
4.1.3.1.7	PT. Jam Krida
4.1.3.2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
4.1.3.2.1	BUMN
4.1.3.2.2	Dst.....
4.1.3.3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4.1.3.3.1	Perusahaan patungan
4.1.3.3.2	PT. SNMP (Lombok Post)
4.1.3.3.3	Dst.....
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
4.1.4.1.1	Pelepasan Hak Atas Tanah
4.1.4.1.2	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
4.1.4.1.3	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
4.1.4.1.4	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4.1.4.1.5	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
4.1.4.1.6	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
4.1.4.1.7	Penjualan Drum Bekas
4.1.4.1.8	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4.1.4.1.9	Penjualan Lampu Hias Bekas
4.1.4.1.10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
4.1.4.1.11	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4.1.4.1.12	Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi
4.1.4.1.13	Penjualan Hasil Pertanian
4.1.4.1.14	Penjualan Hasil Kehutanan
4.1.4.1.15	Penjualan Hasil Perkebunan
4.1.4.1.16	Penjualan Hasil Peternakan
4.1.4.1.17	Penjualan Hasil Perikanan
4.1.4.1.18	Penjualan Hasil Sitaan

KODE REKENING	URAIAN
4.1.4.1.19	Dst.....
4.1.4.2	Penerimaan Jasa Giro
4.1.4.2.1	Jasa Giro Kas Daerah
4.1.4.2.2	Jasa Giro Pemegang Kas
4.1.4.2.3	Jasa Giro Dana Cadangan
4.1.4.2.4	Dst.....
4.1.4.3	Penerimaan Bunga Deposito
4.1.4.3.1	Rekening Deposito pada PT. Bank NTB
4.1.4.3.2	Dst.....
4.1.4.4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
4.1.4.4.1	Kerugian Uang Daerah
4.1.4.4.2	Kerugian Barang Daerah
4.1.4.4.3	Dst.....
4.1.4.5	Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.1.4.5.1	Penerimaan Komisi dari
4.1.4.5.2	Penerimaan Potongan dari
4.1.4.5.3	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari
4.1.4.5.4	Dst.....
4.1.4.6	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.6.1	Bidang Pendidikan
4.1.4.6.2	Bidang Kesehatan
4.1.4.6.3	Bidang Pekerjaan Umum
4.1.4.6.4	Bidang Perumahan Rakyat
4.1.4.6.5	Bidang Penataan Ruang
4.1.4.6.6	Bidang Perencanaan Pembangunan
4.1.4.6.7	Bidang Perhubungan
4.1.4.6.8	Bidang Lingkungan Hidup
4.1.4.6.9	Bidang Pertanahan
4.1.4.6.10	Dst.....
4.1.4.7	Pendapatan Denda Pajak
4.1.4.7.1	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
4.1.4.7.2	Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.1.4.7.3	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Di Air
4.1.4.7.4	Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Di Air
4.1.4.7.5	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4.1.4.7.6	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.1.4.7.7	Pendapatan Denda Pajak Rokok
4.1.4.8	Pendapatan Denda Retribusi
4.1.4.8.1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4.1.4.8.2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4.1.4.8.3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu
4.1.4.8.4	Dst.....
4.1.4.9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4.1.4.9.1	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.9.2	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4.1.4.9.3	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
4.1.4.9.4	Dst.....
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian
4.1.4.10.1	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4.1.4.10.2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
4.1.4.10.3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan
4.1.4.10.4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas
4.1.4.10.5	Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka
4.1.4.10.6	Pendapatan dari pengembalian LHP
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4.1.4.11.1	Fasilitas Sosial
4.1.4.11.2	Fasilitas Umum
4.1.4.11.3	Dst.....
4.1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

KODE REKENING	URAIAN
4.1.4.12.1	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4.1.4.12.2	Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan
4.1.4.12.3	Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas
4.1.4.12.4	Dst.....
4.1.4.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4.1.4.13.1	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
4.1.4.13.2	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
4.1.4.13.3	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4.1.4.14.1	Dari Kelompok Masyarakat....
4.1.4.14.2	dst.....
4.1.4.15	Penerimaan Lain-Lain
4.1.4.15.1	Penerimaan Lain-lain
4.1.4.16	Pendapatan BLUD
4.1.4.16.1	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah
4.2	DANA PERIMBANGAN
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak
4.2.1.1.1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4.2.1.1.2	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.2.1.1.3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
4.2.1.1.4	Bagi hasil pajak Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.2.1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4.2.1.2.2	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4.2.1.2.3	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4.2.1.2.4	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
4.2.1.2.5	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.2.1.2.6	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.2.1.2.7	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4.2.1.2.8	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4.2.1.2.9	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4.2.1.2.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4.2.1.2.11	Dst.....
4.2.2	Dana Alokasi Umum
4.2.2.1	Dana Alokasi Umum
4.2.2.1.1	Dana Alokasi Umum
4.2.3	Dana Alokasi Khusus
4.2.3.1	Dana Alokasi Khusus
4.2.3.1.1	Dana alokasi khusus
4.2.3.1.2	Dst.....
4.2.4	Dana Kontijensi
4.2.4.1	Dana Kontijensi
4.2.4.1.1	Dana Kontijensi
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.1	Pendapatan Hibah
4.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.3.1.1.1	Pemerintah
4.3.1.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.1.2.1	Pemerintah Daerah
4.3.1.3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4.3.1.3.1	Badan/lembaga /organisasi swasta
4.3.1.3.2	Dst.....
4.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Kelompok masyarakat/perorangan
4.3.1.4.1	Kelompok masyarakat/perorangan
4.3.1.4.2	Dst.....
4.3.1.5	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri

KODE REKENING	URAIAN
4.3.1.5.1	Pendapatan Hibah dari Bilateral
4.3.1.5.2	Pendapatan Hibah dari Multilateral
4.3.1.5.3	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4.3.1.5.4	Dst.....
4.3.2	Dana Darurat
4.3.2.1	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.2.1.1	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.2.1.2	Dst.....
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.1.1	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor
4.3.3.1.2	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Di Atas Air
4.3.3.1.3	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.3.3.1.4	Bagi Hasil Dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air
4.3.3.1.5	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.3.3.1.6	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
4.3.3.1.7	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan
4.3.3.1.8	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok
4.3.3.1.9	Dst.....
4.3.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.2.2	Dst.....
4.3.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4.3.3.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4.3.3.3.2	Dst.....
4.3.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4.3.3.4.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4.3.3.4.2	dst.....
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.4.1	Dana Penyesuaian
4.3.4.1.1	Dana BOS
4.3.4.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)
4.3.4.1.3	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (DTP)
4.3.4.2	Dana Otonomi Khusus
4.3.4.2.1	Dana Otonomi Khusus
4.3.4.2.2	Dst.....
4.3.4.3	Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah
4.3.4.3.1	DPIP
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.5.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi
4.3.5.1.1	Bantuan Keuangan Dari Provinsi
4.3.5.1.2	Dst.....
4.3.5.2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten
4.3.5.2.1	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten
4.3.5.2.2	Dst.....
4.3.5.3	Bantuan Keuangan dari Kota
4.3.5.3.1	Bantuan Keuangan Dari Kota
4.3.5.3.2	Dst.....
4.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga
4.3.6.1	Sumbangan Pihak Ketiga
4.3.6.1.1	Sumbangan Pihak Ketiga

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI